

Judul : Tokoh Agama Minta DPR Tunda Pengesahan
Tanggal : Selasa, 25 Juni 2013
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

:: RUU ORMAS



(Kiri-kanan) Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Zahir Khan, Ketua Walubi Rusli Tan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum Forum Masyarakat Katolik Indonesia Veronica Sulisty, dan perwakilan PGI Saltobing Silitonga, memberikan keterangan terkait penolakan terhadap RUU Ormas di Jakarta, kemarin.

Tokoh Agama Minta DPR Tunda Pengesahan

JAKARTA - Tokoh agama dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) meminta agar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas ditunda. Langkah DPR mengesahkan RUU ini dinilai akan mengembalikan rezim pemerintahan yang represif.

Desakan penundaan pengesahan RUU Ormas ini disampaikan 12 perwakilan ormas di Kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDC) Jakarta kemarin. Hadir perwakilan Muhammadiyah, Majelis Taklim Alquran (MTA), Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Media Umat Kristen Indonesia (MUKI), Walubi, Forum Komunikasi Kristen Jakarta (FKKJ), Nasyiatul Aisyiah, Dewan Dakwah Islamiyah,

PGI Wilayah, Persatuan Intelligensi Kristen Indonesia (PIKI) DKI, serta Parmusi.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan, desakan penundaan dan penolakan terhadap rencana pengesahan RUU Ormas didasari tiga alasan. *Pertama*, pihaknya menolak RUU ini karena didasari kepentingan mengawal perjalanan reformasi dan mengantisipasi kembalinya rezim represif. *Kedua*, dalam rangka mengawal ekistensi kebebasan masyarakat madani. "Injuga bagian upaya penegakan konstitusi seperti Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat," kata Din.

Ketiga, RUU Ormas ini diduga syarat kepentingan politik. Din menduga RUU ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan mobilisasi dukungan jelang Pemilu 2014.

Rapat paripurna DPR hari ini, Selasa (25/6), mengagendakan pengambilan keputusan tingkat kedua atau pengesahan atas RUU Organisasi Masyarakat (Ormas). Karena sampai sejauh ini masih banyak kritik dan penolakan atas RUU tersebut, pengesahannya pun diprediksi bakal alot. "Ya, mungkin nanti tidak akan seberat paripurna soal BBM. Tetapi, nanti pastikan ada lobi-lobi," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja di Gedung DPR Jakarta kemarin.

Badan Musyawarah (Bamus) DPR kemarin telah memutuskan agar RUU Ormas dibawa ke paripurna untuk disahkan. Namun, hingga Bamus mengagendakan paripurna dan menetapkan hari serta tanggalnya, FPAN masih

dalam posisi menolak pengesahan RUU tersebut.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haromain mengatakan, kekhawatiran sejumlah ormas terhadap RUU Ormas yang akan disahkan sebenarnya tidak cukup alasan. Pasal-pasal yang dipersoalkan oleh beberapa ormas sudah dihapus karena memang dianggap berpotensi menjadi payung hukum untuk perlakuan represif. Selain itu, masukan-masukan dari ormas sebagaimana disampaikan dalam audiensi dengan pansus juga sudah diakomodasi. "Semua keberatan sudah kami akomodasi. Bayangkan, dari awalnya hanya 50 pasal sekarang menjadi 88 pasal. Jadi penolakannya di bagian mana lagi?" kata Malik.

● andi setiawan/
rahmat sahid